

106 PESERTA IKUTI UNAR NON REGULER

Pelanggaran Frekuensi Radio Ditertibkan



Pembukaan UNAR Non Reguler yang digelar Minggu (12/7).

KR-Ardhi Wahdan

YOGYA (KR) - Setiap bentuk pelanggaran terhadap frekuensi radio akan ditertibkan tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, para amatir radio diminta taat regulasi serta menggunakan izin sesuai peruntukannya.

Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta Heriyanto, menjelaskan masih ada laporan komplain gangguan frekuensi oleh anggota amatir radio yang disampaikan oleh kalangan instansi. Apalagi jika pelanggaran itu menyebabkan gangguan keselamatan manusia maka bisa diancam pidana.

"Melalui kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) ini kami harapkan kapasitas amatir radio bisa meningkat," jelasnya di sela pelaksanaan UNAR Non Reguler, Minggu (12/7).

Menurutnya, peran para pelaku amatir radio dalam hal kemanusiaan sudah tidak bisa diragukan. Apalagi ketika terjadi bencana yang memutus sarana telekomunikasi konvensional. Upaya penyelamatan korban serta distribusi bantuan bisa lebih cepat dengan jalur komunikasi radio amatir.

UNAR Non Reguler kali ini diikuti

106 peserta dari wilayah DIY dan Jawa Tengah serta satu orang dari Jambi. Peserta terdiri dari tingkat Siaga 98 orang, Penggalang 3 orang, dan Penegak 5 orang. Kegiatan tersebut sebenarnya rutin digelar, terutama UNAR Reguler tiap bulan yang diselenggarakan di Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta Jalan Veteran. Hanya saja terjadi pandemi Covid-19, UNAR Reguler sejak April tidak dapat digelar dan akan diagendakan kembali pada Agustus hingga Desember.

Sementara UNAR Non Reguler tahun ini digelar satu kali di luar kantor. Meski saat ini dilaksanakan dalam fase kenormalan baru, namun mengedepankan protokol ketat. Hal ini juga sudah dikordinasikan dengan gugus tugas penanganan Covid-19 di daerah.

Heriyanto menegaskan, UNAR bagi calon amatir radio menjadi hal yang

mutlak. Terutama dalam menetapkan tingkat kecakapan dalam kegiatan amatir radio berdasarkan Izin Amatir Radio (IAR). "Dengan IAR, maka seorang amatir radio telah memiliki izin untuk mendirikan, memiliki, dan mengoperasikan stasiun radio amatir sesuai ketentuan yang berlaku," tandasnya.

Untuk mengikuti UNAR pendaftarannya kini semakin dimudahkan. Sistem pendaftaran online dapat diakses melalui laman iar-ikrap.postel.go.id sedangkan sistem ujiannya berbasis komputer. Dengan begitu, peserta dapat mendaftar dan mengikuti UNAR di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan jadwal yang tercatat dalam aplikasi.

Ketua ORARI Daerah DIY Anton Sutrisno, berharap setelah lulus UNAR terutama siaga, segera mengurus kartu anggota ORARI di lokasi masing-masing. Jika terlambat, maka IAR yang diterima bisa otomatis terhapus. Kode etik amatir radio juga wajib ditaati. "Organisasi lokal juga akan rutin memberikan bimbingan agar prosedur operasinya terstandar," tandasnya. **(Dhi)-f**

PENERIMA DIPROYEKSIKAN BERKURANG Dinsos Masih Tunggu Kelanjutan JPS Kemensos

YOGYA (KR) - Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari Kementerian Sosial (Kemensos) bagi warga terdampak Covid-19 tahap pertama digulirkan hingga Juni, terutama berupa Bantuan Sosial Tunai (BST). Dinas Sosial (Dinsos) Kota Yogya hingga saat ini masih menunggu kepastian kelanjutan program tersebut.

Kepala Dinsos Kota Yogya Agus Sudrajat, menuturkan dampak pandemi virus Korona dari aspek sosial hampir semua segmen masyarakat merasakan. Hanya tingkat ketahanannya bervariasi. "Ada yang tahan sampai satu bulan atau bahkan begitu kena dampak langsung jatuh. Kenapa bantuan pemerintah waktu itu untuk tiga bulan, karena asumsi ketahanan paling besar tiga bulan. Tapi kita menunggu Juli sampai Desember itu nanti seperti apa," jelasnya, Minggu (12/7).

Program JPS periode April hingga Juni yang digulirkan Kemensos

mendasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan beragam intervensi. Di Kota Yogya penerima BST mencapai 8.330 KK, sembako reguler atau Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) 11.480 KK, sembako perluasan atau Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) 8.538 KK, dan Program Keluarga Harapan (PKH) 3.952 KK.

Selain itu, Pemkot Yogya juga mengalokasikan BST dengan nilai yang sama yakni Rp 600.000 perbulan bagi warga terdampak namun belum mendapatkan intervensi dari Kemensos. Masing-masing mencapai 4.396 KK hasil pendataan Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) 2019, 872 KK KSJPS 2018, dan 2.961 KK DTKS. Informasi yang beredar saat ini, program JPS tersebut akan diperpanjang hingga Desember dengan nominal bantuan yang lebih rendah.

"Kepastian ini yang masih kami nantikan. Apakah jumlah bantuan

berkurang separuh atau justru tidak dilanjutkan," imbuh Agus.

Ketika JPS dilanjutkan, Agus menilai jumlah penerima diproyeksikan berkurang antara 15 hingga 17 persen. Hal ini berdasarkan proses pembersihan data yang dilakukannya secara ketat. Apalagi DTKS yang menjadi acuan Kemensos merupakan data tahun 2015 serta belum semua berbasis KK. Sehingga selama lima tahun berselang terjadi dinamika sehingga banyak warga yang sebelumnya masuk intervensi, menjadi tidak berhak lagi menerima bantuan.

Warga yang tidak lagi berhak antara lain disebabkan meninggal dunia, pindah domisili sehingga tidak ditemukan, NIK tidak valid, serta beralih menjadi ASN, TNI atau Polri. "Tapi yang berhasil kami bersihkan itu lantas kami susulkan data dari KSJPS yang belum masuk DTKS. Harapan kami ke depan tidak ada irisan lagi antara KSJPS dan DTKS," tandasnya. **(Dhi)-f**

Langkah Strategis Layanan Pembelajaran

YOGYA (KR) - Pada lembaga pendidikan, kurikulum merupakan landasan sekaligus arahan dan acuan tertulis agar kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru dan stakeholders di lembaga pendidikan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Sementara adanya kebijakan dari pemerintah untuk pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah, tentu saja berpengaruh pada kurikulum yang harus dirancang dan disiapkan sekolah. Termasuk langkah strategis yang harus dilakukan dalam rangka memberikan layanan pembelajaran yang memungkinkan ketercapaian kurikulum dengan efektif dan efisien.

Hal tersebut yang menjadi poin penting saat dilakukan sosialisasi dan uji publik kurikulum dari SDIT Al Khairaat di Gedung DPD RI DIY, Jalan Kusumanegara Yogyakarta, akhir pekan kemarin. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Drs Rohmat MPd, Pengurus Harian JSIT Indonesia Wilayah DIY Dr H Ahsanul Fuadi, Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan UNY Deni Hardianto MPd

serta Triyono Hari Kuncoro dari DPRD Kota Yogyakarta sekaligus Ketua Komite Sekolah. "Kegiatan tersebut demi mendapatkan masukan atas kurikulum SDIT Al Khairaat," jelas Kepala SDIT Al Khairaat H Rojikin SPd.

Menurutnya, pada masa Pandemi Covid-19 ini SDIT Al Khairaat sudah melakukan pembelajaran jarak jauh memanfaatkan berbagai teknologi informasi. Hal tersebut dilakukan setelah dilakukan kompromi secara intensif dengan komite sekolah.

"Sebagai sekolah dengan keunggulannya pada Alquran, praktik pembelajaran seperti itu tentu bukan tanpa kendala. Guru dituntut merancang strategi terbaik agar target pada pembelajaran Alquran dapat tercapai meski capaiannya tidak seperti ketika pada masa normal," sebutnya.

Namun demikian pihaknya sudah menyiapkan sejumlah skenario jika proses pembelajaran jarak jauh akan dilakukan berkelanjutan. Sebab kualitas pendidikan menjadi hal penting yang harus dicapai demi kemajuan peserta didik. **(Feb)-f**

DISESUAIKAN DARURAT COVID-19

Matsayo Uji Publik Kurikulum

YOGYA (KR) - Menyongsong tahun ajaran baru 2020/2021, MTs Negeri 1 Yogyakarta (Matsayo) melaksanakan uji publik kurikulum, belum lama ini. Madrasah setempat telah menyiapkan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan tanggap darurat Covid-19. Uji publik dihadiri Kasi Dikmad Kemenag Kota Yogyakarta, Dra Uswatun Hasanah serta Murtinah MA (Pengawas MTs Kantor Kemenag Kota Yogyakarta) yang juga sebagai narasumber.

Uswatun Hasanah mengapresiasi uji publik kurikulum yang diadakan oleh Tim Pengembangan Kurikulum Matsayo ini karena merupakan bentuk komitmen madrasah dalam rangka menjalankan kegiatan belajar mengajar. Pada masa pandemi Covid-19 Kementerian juga mengeluarkan regulasi keputusan Dirjen Pendis No. 2791 tahun 2020 tentang Kurikulum Darurat.

Sedangkan Muhammad Iriyadi, Kepala Matsayo, menyampaikan bahwa untuk menyambut madrasah setempat sebagai madrasah riset, maka kurikulum ini telah disusun oleh tim pengembang kurikulum berdasarkan KMA 183 dan 184 tahun 2019. Serta berbagai masukan dari Kasi Kursis Kanwil Kemenag DIY, pada kegiatan Pembinaan Madrasah Riset yang digelar

Juni 2020 lalu. "Penyusunan kurikulum ini juga telah disesuaikan dengan kondisi darurat saat ini. Hal ini dikarenakan di masa pandemi Covid-19 ini, setiap madrasah diharapkan mampu menyelenggarakan pelayanan pembelajaran terhadap seluruh peserta didiknya dengan optimal. Salah satu caranya dengan memanfaatkan IT karena proses tatap muka belum bisa dilaksanakan," ujarnya.

Sedangkan Murtinah, selaku narasumber sekaligus penelaah uji publik kurikulum Matsayo, menyampaikan beberapa hal terutama terkait dengan tim pengembang kurikulum madrasah agar lebih mampu menyelaraskan dengan semua pihak. "Yaitu selaras antara isi yang tertuang dalam KT-SP dengan realita yang dihadapi. Apalagi Matsayo direncanakan akan menjadi madrasah riset, maka diharapkan kurikulum yang disusun ini mampu menjadi pedoman dalam mewujudkan visi dan misi Matsayo sebagai madrasah riset ke depan," terangnya.

Selain itu, ia juga mengusulkan harus adanya satu guru BK untuk masuk di kelas riset. Guru BK ini bertugas sebagai perantara anak-anak di kelas tersebut mulai dari kelas 7 hingga kelas 8. **(Cam)-f**

DWP DIY Bagikan 300 Paket Sembako

YOGYA (KR) - Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada penurunan ekonomi masyarakat secara luas. Melihat kondisi tersebut, Dharma Wanita Persatuan (DWP) DIY termotivasi untuk meringankan beban warga terdampak lewat bakti sosial dengan membagikan 300 paket sembako kepada tukang becak, guru PAUD dan masyarakat sekitar yang membutuhkan. Pembagian dilakukan di kantor sekretariat Dharma Wanita Persatuan DIY, Bale Tanjung Kompleks Kepatihan.

"Apabila dilihat dari banyaknya masyarakat yang terdampak dari segi ekonomi, permasalahan tersebut tidak akan selesai apabila hanya mengandalkan bantuan pemerintah. Oleh karena itu dibutuhkan sikap proaktif dari seluruh lapisan masyarakat. Sehingga bisa meringankan beban warga yang terdampak pandemi Covid-

19," kata Ketua Dharma Wanita Persatuan DIY Sri Endah Pujiati Baskara Aji kepada KR, Minggu (12/7).

Sri Endah Pujiati menyatakan, lewat kegiatan ini pihaknya berharap dapat menumbuhkan jiwa solidaritas dan kepedulian anggota DWP se-DIY. Dengan begitu, bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak oleh pandemi Covid-19. Karena pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi tidak bisa dipungkiri telah mengubah banyak tatanan dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya dari sektor kesehatan maupun pendidikan tapi juga ekonomi.

"Kami berharap lewat kegiatan bakti sosial ini bisa sedikit meringankan beban tukang becak, guru PAUD dan masyarakat yang terdampak oleh adanya pandemi Covid-19," ujarnya. **(Ria)-f**

CADANGAN BERAS AMAN HINGGA 10 BULAN

Ketersediaan Pangan Rutin Dipantau

YOGYA (KR) - Selama masa pandemi virus Korona, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogya rutin memantau ketersediaan pangan. Hasil dari pemantauan sejauh ini ketersediaan di masyarakat masih tercukupi dengan baik. Intervensi kebijakan juga belum direkomendasikan.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogya Sugeng Darmanto, menyebutkan pemantauan ketersediaan pangan meliputi 11 bahan pokok mulai dari beras, minyak dan sebagainya. "Sudah ada Tim Ketahanan Pangan Daerah yang rutin memantau di pasar, toko modern, distributor dan lainnya. Meski ada pandemi namun stok pangan masyarakat cukup tersedia," jelasnya, Minggu (12/7).

Setiap hasil pemantauan juga dilaporkan ke pemerintah pusat. Oleh karena itu pendataan dilakukan di semua tempat yang menyediakan bahan

pangan. Tim Ketahanan Pangan Daerah juga tidak sekedar memantau dan mencatat stok yang ada melainkan hingga membuat peta di tiap wilayah.

Sugeng mengaku, dari 14 kecamatan yang ada di Kota Yogya sebetulnya sudah terpetakan ketersediaan pangannya. Wilayah yang mengalami rawan pangan pun akan mudah dilihat dengan mempertimbangkan stok dengan tingkat konsumsi masyarakat setempat. "Kita lihat berapa masyarakat yang kesulitan menjangkaunya. Dari sisi akses kan tidak ada hambatan karena wilayah kota distribusinya bagus. Biasanya hanya pada tingkat daya beli," urainya.

Diakuinya, dari sisi daya beli selama masa pandemi ada penurunan namun tidak signifikan. Apalagi sudah ada intervensi dari pemerintah pusat hingga daerah dengan skema bantuan sosial

tunai. Sehingga warga terdampak maupun warga miskin masih memiliki kemampuan membeli kebutuhan pangan.

Selain kondisi ketersediaan pangan di wilayah, Pemkot Yogya selama ini juga memiliki cadangan beras yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Cadangan beras yang dimiliki Pemkot Yogya sudah mencapai 16,7 ton dan cukup hingga 10 bulan ke depan. "Cadangan beras itu sifanya *on call*. Sewaktu-waktu bisa dikeluarkan terutama ketika ada inflasi, bencana alam dan sosial," katanya.

Selama kondisi pandemi Covid-19 cadangan beras sebenarnya bisa dikeluarkan. Akan tetapi karena akses pangan masih terkendali dan tidak menimbulkan gejolak pangan, maka hal itu tidak dilakukan. Apalagi ketersediaan pangan di wilayah masih cukup aman dan mencukupi. **(Dhi)-f**

DIUSULKAN MASUK PROPEMPERDA 2021

Penanggulangan Bencana Non Alam Perlu Aturan

YOGYA (KR) - Kejadian pandemi virus Korona mendorong tercetusnya aturan penanggulangan bencana non alam. Meski setiap daerah sudah memiliki perda terkait penanggulangan bencana, namun belum spesifik membahas mitigasi bencana non alam.

Menurut Ketua DPRD Kota Yogya Danang Rudyatmoko, dalam sosialisasi revisi Perda DIY Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana, dirinya sudah mengusulkan agar memasukkan materi khusus bencana non alam. "Bencana non alam seperti pandemi Covid-19 ini secara kasat mata virusnya tidak terlihat dan waktu selesainya pun tidak bisa dipastikan. Saat sosialisasi rencana revisi perda DIY itu juga sudah saya sampaikan," ujarnya, Kamis (9/7).

Perda yang usianya sudah mencapai lima tahun ke atas serta menjadi

tidak relevan pada kondisi saat ini memang harus ada upaya revisi. Begitu pula Perda Kota Yogya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah. Kendati menyinggung bencana non alam seperti pandemi namun belum diatur secara khusus dalam pasal.

Aturan yang membahas penanggulangan bencana non alam, imbuh Danang, tidak hanya mengatur secara khusus mengenai Covid-19. Melainkan juga jenis penyakit lain yang memiliki kecepatan dalam bermutasi. "Pemkot selaku pembuat regulasi saya kira perlu mengumpulkan para dokter untuk menggali masukan. Penyakit apa saja yang cara bermutasinya cepat. Itu perlu diakomodir dalam perda," imbuhnya.

Selain itu, meski kini sudah terbit Perwal 51/2020 terkait pedoman menuju tata kenormalan baru, menurut Danang, bukan perkara

mudah untuk dijadikan perda. Selain harus merubah Program Pembuatan Peraturan Daerah (Propempera) 2020, sejauh ini naskah akademiknya juga belum jelas. Oleh karena itu, dirinya mengusulkan agar aturan penanggulangan bencana non alam bisa masuk Propempera 2021.

Sementara terkait Propempera 2020, dari target sembilan raperda, sebagian sudah diselesaikan. Masih ada satu raperda yang sejak awal tahun dibahas namun belum selesai, yakni terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal ini karena pansus raperda tersebut masih melakukan konfirmasi ke Pemda DIY terkait kewilayahan di Kota Yogya. "Raperda yang lain akan kami selesaikan di triwulan kedua. Akhir tahun insyaallah semua Propempera 2020 sudah bisa diselesaikan," tandasnya. **(Dhi)-f**